



Laporan Akhir

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota **Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik memberikan energy baru bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik karena adanya transparansi, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28F Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Wujud implementasinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan surat keputusan Bupati Pesisir Selatan yang disingkat PPID, yaitu Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Laporan ini disusun sebagai salah bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas hasil pelaksanaan seluruh rangkaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan dengan sumber anggaran dari APBD Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sasaran	5
1.5 Lokasi	5
1.6 Ruang Lingkup Kegiatan	5
1.7 Waktu Pelaksanaan	6
1.8 Keluaran dan Hasil Kegiatan	6
1.9 Pembiayaan	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	7
2.1 Organisasi dan Tata Kerja	7
2.2 Pelaksanaan Kegiatan	8
2.3 Realisasi Anggaran	16
BAB III PENUTUP	18
LAMPIRAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedalutan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Pemerintahan Daerah yang secara optimal menerapkan *Good Governance* di lingkungannya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID Utama. Sementara itu, Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari juga membentuk PPID Pembantu pada unit kerjanya masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Wali Nagari, dimana Sekretaris Perangkat Daerah/Nagari sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publiknya.

Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang optimal sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan informasi publik didukung oleh seluruh PPID Pembantu (Perangkat Daerah/Nagari). Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dibidang komunikasi, statistik, persandian dan informatika serta pengelolaan informasi publik yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Dasar Hukum

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

“ Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju ”

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai akhir Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan berbagai Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- a. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/281/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/403/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/97/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/142/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Perangkat Daerah Tahun 2021.
- f. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/549/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021.
- g. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/550/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pedoman Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021.
- h. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/668/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021.

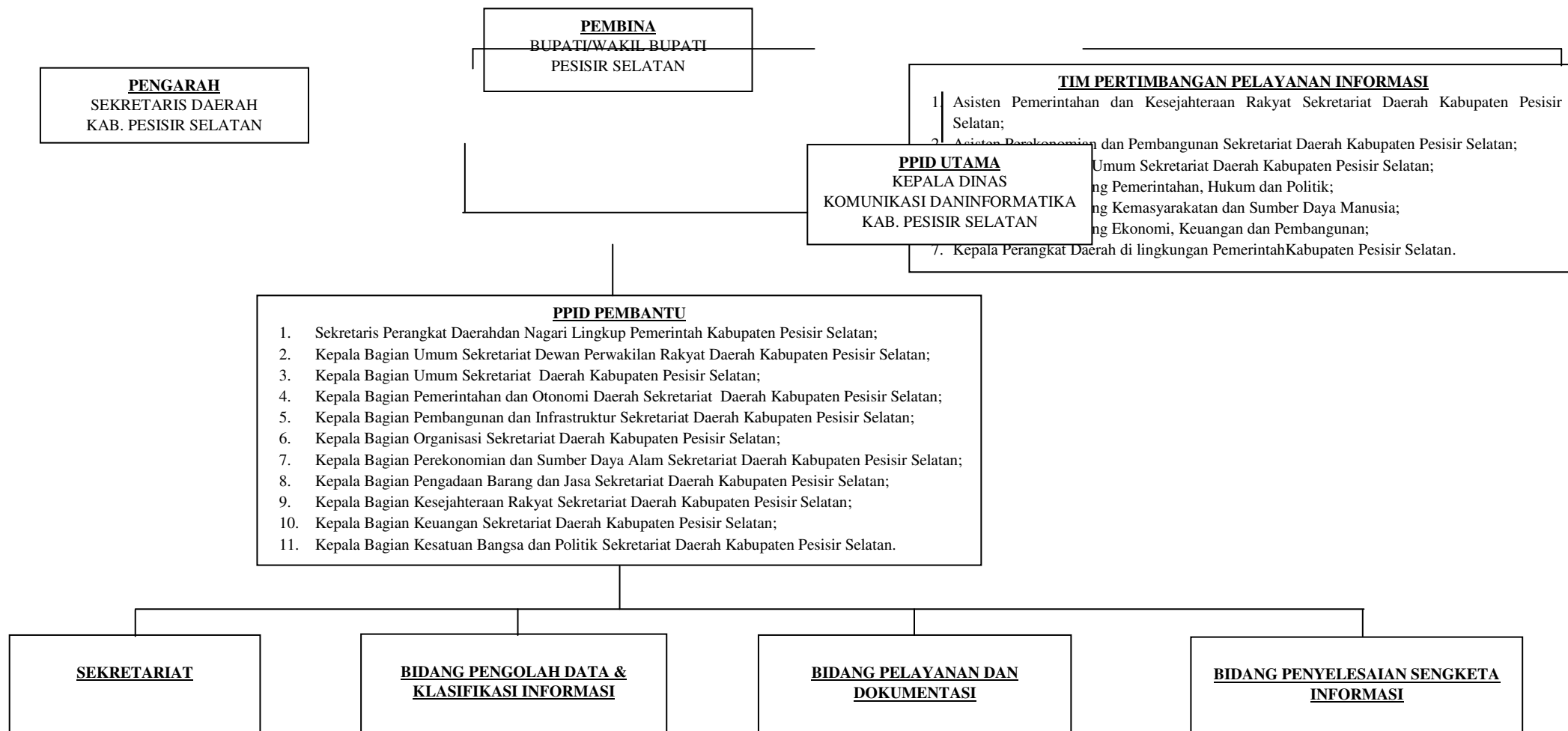
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi. Tugas dan Fungsi PPID dibidang pengelolaan/pelayanan informasi dan dokumentasi publik, dengan Pembina (Bupati/Wakil Bupati), Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Utama (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan), dengan Surat Keputusan terlampir.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. Maksud : sebagai laporan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik dari Januari s.d Desember 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Tujuan : sebagai bahan evaluasi untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik kedepannya.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya pendokumentasian DIP dan Pelayanan Informasi Publik
- b. Terlaksananya penguatan tugas dan fungsi serta Pembinaan SDM PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi operator/Admin PPID
- d. Terlaksananya Penguatan komitmen Badan Publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik
- e. Terlaksananya Pemeringkatan PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tingkat Kabupaten dan keikutsertaan PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemeringkatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat

1.5. Lokasi

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik memiliki ruang lingkup berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memberikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

- b. Pengumpulan, penyediaan dan pendokumentasian dokumen informasi publik
- c. Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dan rapat koordinasi baik tingkat nagari, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

1.7. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

1.8. Keluaran dan Hasil Kegiatan

- a. Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yaitu terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Utama dan PPID Pembantu (OPD dan Nagari)
- b. Hasil yang diicapai sesuai dengan ukuran kinerja adalah tersedianya dokumen daftar informasi publik (DIP) dan aktifnya seluruh PPID Pembantu di Lingkungan serta menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Informatif.

1.9. Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 200.220.650,- (*Dua ratus juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dan setelah perubahan Rp. 170.194.150,- (*Seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pengguna Anggaran
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ : Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Seksi Penyediaan Informasi Publik Kegiatan (PPTK)
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

Sedangkan untuk Penanggung jawab teknis kegiatan adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik perangkat daerah dan nagari di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan surat keputusan Bupati Nomor : 555/97/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dengan susunan organisasi dapat dilihat pada bagian lampiran.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan penyusunan dokumen daftar informasi publik melalui website masing-masing PPID Pembantu yang terintegrasi dengan website PPID utama (<https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>) yang akan diverifikasi oleh tim PPID Utama. Jumlah DIP untuk Tahun 2021 sebanyak : 9.229 DIP. Berikut rincian jumlah DIP masing-masing PPID Pembantu dan PPID Nagari :

A. Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	DINAS KESEHATAN*	865	87	100.00	13
2	SEKRETARIAT DAERAH	310	115	100.00	5
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL*	343	121	100.00	4
4	DINAS SOSIAL PPr DAN PA	325	80	100.00	4
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*	373	64	100.00	3
6	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN*	213	82	100.00	0
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	115	47	93.50	0
8	RSUD TAPAN*	317	41	90.50	2
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	244	38	89.00	2
10	BAPEDALITBANG	191	32	86.00	1
11	BKPSDM	345	25	82.50	4
12	DPMSPPKB	190	25	82.50	1
13	DISTANHORTBUN	113	17	78.50	0
14	DPMPTSP	163	11	75.50	1
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	192	6	73.00	1
16	DINAS PERHUBUNGAN	102	0	70.00	0
17	DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	97	0	67.90	0
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	77	16	61.90	0
19	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	77	0	53.90	0
20	SATPOL PP DAN DAMKAR	76	0	53.20	0
21	SEKRETARIAT DPRD	43	44	52.10	0
22	BADAN PENDAPATAN	68	0	47.60	0
23	DINAS PUPR	60	10	47.00	0
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	66	0	46.20	0
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	65	0	45.50	0
26	DINAS PERKIMTAN	39	26	40.30	0
27	INSPEKTORAT	55	0	38.50	0

28	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	41	17	37.20	0
29	DINAS PANGAN	43	8	34.10	0
30	DINAS PERIKANAN	22	0	15.40	0
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19	2	14.30	0
JUMLAH TOTAL		5,249	914		

B. Kecamatan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	KECAMATAN BATANG KAPAS	403	269	100.00	21
2	KECAMATAN AIRPURA	338	165	100.00	14
3	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	243	115	100.00	8
4	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	168	140	100.00	7
5	KECAMATAN RANAH PESISIR	73	33	95.63	0
6	KECAMATAN SUTERA	57	153	83.20	6
7	KECAMATAN IV JURAI	63	32	85.47	0
8	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	106	16	83.33	0
9	KECAMATAN LENGAYANG	63	26	80.47	0
10	KECAMATAN PANCUNG SOAL	54	44	80.40	0
11	KECAMATAN SILAUT	70	4	68.67	0
12	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	25	28	46.67	0
13	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	39	1	37.23	0
14	KECAMATAN LUNANG	37	0	34.53	0
15	KECAMATAN BAYANG	10	3	11.83	0
JUMLAH TOTAL		1,749	1,029		

C. Pemerintahan Nagari

NO.	NAGARI	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	NAGARI KUBU TAPAN	133	43	100.00	4
2	NAGARI BUNGA PASANG SALIDO	132	38	100.00	4
3	NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN	86	37	100.00	2
4	NAGARI DURIAN SERIBU	107	20	95.00	2
5	NAGARI KOTO RAWANG	76	13	86.25	1
6	NAGARI SAMBUNGO	118	3	73.75	2
7	NAGARI MUARA INDERAPURA	41	13	73.65	0
8	NAGARI SAGO SALIDO	31	28	73.40	0
9	NAGARI INDERAPURA TENGAH	79	1	71.25	1
10	NAGARI SUNGAI PULAI	77	0	70.00	1
11	NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG	70	0	70.00	0
12	NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	68	0	70.00	0
13	NAGARI BINJAI TAPAN	45	1	64.25	0
14	NAGARI SALIDO SARI BULAN	42	0	58.80	0
15	NAGARI BATU HAMPAR SELATAN	40	0	56.00	0
16	NAGARI LUBUK BUNTA	31	9	54.65	0
17	NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO	34	0	47.60	0
18	NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN	33	0	46.20	0
19	NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	33	0	46.20	0
20	NAGARI LAKITAN UTARA	31	2	45.90	0
21	NAGARI PADANG XI PUNGGASAN	30	3	45.75	0
22	NAGARI PALOKAN INDERAPURA	32	0	44.80	0
23	NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO	32	0	44.80	0
24	NAGARI MANDEH	30	2	44.50	0
25	NAGARI SIGUNTUR TUA	31	0	43.40	0
26	NAGARI TAMBANG	30	0	42.00	0

27	NAGARI TALUAK	29	0	40.60	0
28	NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI	29	0	40.60	0
29	NAGARI LIMAU PURUT TAPAN	27	0	37.80	0
30	NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	27	0	37.80	0
31	NAGARI GURUN PANJANG UTARA	25	1	36.25	0
32	NAGARI PASAR BARU	24	0	33.60	0
33	NAGARI RIAK DANAU TAPAN	23	0	32.20	0
34	NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK	23	0	32.20	0
35	NAGARI INDERAPURA TIMUR	22	0	30.80	0
36	NAGARI KAMBANG TIMUR	22	0	30.80	0
37	LIMAU GADANG LUMPO	20	0	28.00	0
38	NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	20	0	28.00	0
39	NAGARI KOTO VIII PELANGAI	20	0	28.00	0
40	NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO	19	1	27.85	0
41	NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA	19	0	26.60	0
42	NAGARI TALANG BINJAI	19	0	26.60	0
43	NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	19	0	26.60	0
44	NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA	18	0	25.20	0
45	NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK	17	0	23.80	0
46	NAGARI SUNGAI SARIK	17	0	23.80	0
47	NAGARI LAKITAN	17	0	23.80	0
48	NAGARI SIGUNTUR	17	0	23.80	0
49	NAGARI SUNGAI TUNU UTARA	15	0	21.00	0
50	NAGARI BUKIT BUAI TAPAN	15	0	21.00	0
51	NAGARI SETARA NANGGALO	14	0	19.60	0
52	NAGARI LUNANG BARAT	13	0	18.20	0
53	NAGARI API-API PASAR BARU	12	0	16.80	0
54	NAGARI IV KOTO HILIE	11	0	15.40	0

55	NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO	10	0	14.00	0
56	NAGARI KAMBANG BARAT	6	4	13.40	0
57	NAGARI TEBING TINGGI TAPAN	9	0	12.60	0
58	NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA	9	0	12.60	0
59	NAGARI PAINAN	3	6	11.70	0
60	NAGARI AMPUAN LUMPO	8	0	11.20	0
61	NAGARI PASIA PELANGAI	7	0	9.80	0
62	NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI	7	0	9.80	0
63	NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI	6	1	9.65	0
64	NAGARI INDERAPURA UTARA	6	1	9.65	0
65	NAGARI INDERAPURA SELATAN	1	6	8.90	0
66	NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA	6	0	8.40	0
67	NAGARI LUNANG UTARA	1	5	7.65	0
68	NAGARI PASAR TAPAN	5	0	7.00	0
69	NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA	5	0	7.00	0
70	NAGARI KOTO BERAPAK	4	1	6.85	0
71	NAGARI BATU HAMPA	0	5	6.25	0
72	NAGARI TALUK TIGO SAKATO	4	0	5.60	0
73	NAGARI LAKITAN TIMUR	4	0	5.60	0
74	NAGARI LUNANG TIGA	0	4	5.00	0
75	NAGARI AMPING PARAK	3	0	4.20	0
76	NAGARI LAKITAN TENGAH	3	0	4.20	0
77	NAGARI LAKITAN SELATAN	3	0	4.20	0
78	NAGARI KAMBANG	2	1	4.05	0
79	NAGARI PUNGASAN UTARA	2	0	2.80	0
80	NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	2	0	2.80	0
81	NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA	2	0	2.80	0
82	NAGARI AUR DURI SURANTIH	2	0	2.80	0

83	NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA	1	0	1.40	0
84	NAGARI PUNGGASAN TIMUR	1	0	1.40	0
85	NAGARI BATANG BETUNG TAPAN	1	0	1.40	0
86	NAGARI INDERAPURA BARAT	1	0	1.40	0
87	NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	1	0	1.40	0
88	NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	1	0	1.40	0
89	NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO	1	0	1.40	0
90	NAGARI AIR HAJI BARAT	1	0	1.40	0
91	NAGARI INDERAPURA	1	0	1.40	0
92	NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU	1	0	1.40	0
93	NAGARI GURUN PANJANG SELATAN	1	0	1.40	0
94	NAGARI TALAOK	1	0	1.40	0
95	NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA	1	0	1.40	0
96	NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK	1	0	1.40	0
97	NAGARI PELANGAI KACIAK	1	0	1.40	0
98	NAGARI LUNANG DUA	0	1	1.25	0
99	NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN	0	1	1.25	0
100	NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN	0	1	1.25	0
101	NAGARI BATANG ARAH TAPAN	0	1	1.25	0
JUMLAH TOTAL		2,180	253		

2. Memfasilitasi dan mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, 7 April 2021



3. Memfasilitasi dan mengikuti Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, 8 April 2021.



4. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumatera Barat Tahun 2021 sekaligus sebagai informasi ahli
 - a. Rapat Pokja Komisi Informasi dgn Informan Ahli Keterbukaan Informasi Sumbar di Komisi Informasi Provinsi Sumbar Tanggal 23 Maret 2021



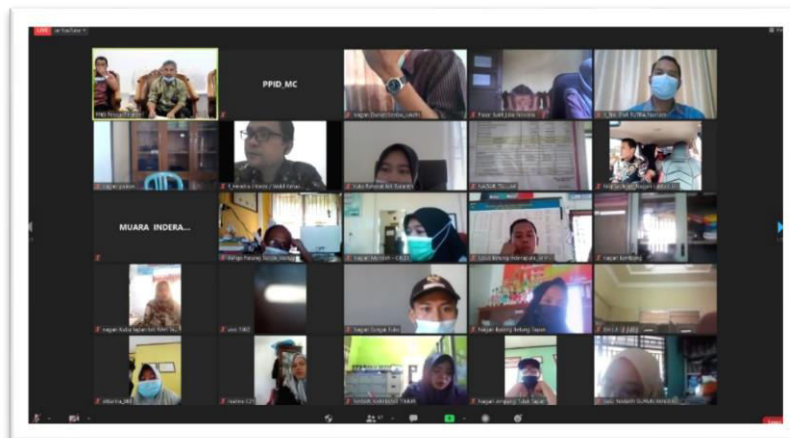
- b. Wawancara Tim Pokja dengan Informan Ahli Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 26 Maret 2021



- c. FDG Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumatera Barat Tahun 2021 di Padang tanggal 23 April 2021.



5. Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ke PPID Pembantu (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari
- a. Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan melalui aplikasi *zoom meeting* tanggal 21 – 22 Juli 2021



- b. Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut



c. Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut



d. Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan



e. Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang



f. Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai



3. Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu dan PPID Nagari melalui Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 (September – November 2021). Pemeringkatan dilakukan dengan beberapa tahapan penilaian dimulai dengan pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self Assesment Questionnaire/SAQ), Verifikasi Kuesioner dan Website, dan Visitasi. Indikator dalam Pemeringkatan PPID Pembantu terdiri dari :

- a. Indikator Pengisian Website
- b. Indikator Pengumuman Informasi Publik
- c. Indikator Penyediaan Informasi Publik
- d. Indikator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

A. Bimbingan Teknis Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 melalui aplikasi *zoom meeting* tanggal 22 September 2021



B. Visitasi 5 (lima) besar Badan Publik yang masuk nominasi Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 tanggal 1 – 4 November 2021

a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



c) Dinas Kesehatan



d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



e) RSUD M. Zein Painan



f) Kecamatan Batang Kapas



g) Kecamatan Lengayang



h) Kecamatan Airpura



i) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan



j) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan



k) Nagari Taratak Sungai Lundang



l) Nagari Bunga Pasang Salido



m) Nagari Koto Rawang



n) Nagari Kubu Tapan



o) Nagari Durian Seribu



C. Anugerah Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Hasil akhir Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021:

a. **KATEGORI : PERANGKAT DAERAH**

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	DINAS SOSIAL, PPt DAN PA	55.99	35.77	91.76	Informatif
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	53.04	34.89	87.93	Informatif
3	RSUD M. ZEIN PAINAN	52.85	36.46	86.72	Informatif
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	52.23	33.79	86.64	Informatif
5	DINAS KESEHATAN	50.26	33.11	85.34	Informatif
6	BKPSDM	49.65	0	49.65	Kurang Informatif
7	RSUD TAPAN	47.22	0	47.22	Kurang Informatif
8	BPKD	44.35	0	44.35	Kurang Informatif
9	DINAS TANAMAN PANGAN HOTBUN	37.73	0	37.73	Kurang Informatif
10	BAPEDALITBANG	37.11	0	37.11	Kurang Informatif

11	SEKRETARIAT DAERAH	37.04	0	37.04	Kurang Informatif
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	36.51	0	36.51	Kurang Informatif
13	DINAS PMD,PP DAN KB	34.71	0	34.71	Kurang Informatif
14	BADAN PENDAPATAN	33.95	0	33.95	Kurang Informatif
15	SEKRETARIAT DPRD	33.83	0	33.83	Kurang Informatif
16	DINAS PSDA	33.69	0	33.69	Kurang Informatif
17	DINAS PERHUBUNGAN	31.45	0	31.45	Kurang Informatif
18	DINAS PANGAN	30.57	0	30.57	Kurang Informatif
19	SATPOL PP DAN DAMKAR	29.63	0	29.63	Tidak Informatif
20	BPBD	29.00	0	29.00	Tidak Informatif
21	DINAS PERKIMTAN	28.81	0	28.81	Tidak Informatif
22	DINAS PENANAMAN MODAL PPTSP	28.78	0	28.78	Tidak Informatif
23	DINAS KOPERASI & UMKM	28.75	0	28.75	Tidak Informatif
24	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRA	27.81	0	27.81	Tidak Informatif
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27.62	0	27.62	Tidak Informatif
26	INSPEKTORAT	25.64	0	25.64	Tidak Informatif
27	DINAS PUTR	25.38	0	25.38	Tidak Informatif
28	DINAS PERIKANAN	24.40	0	24.40	Tidak Informatif
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	22.47	0	22.47	Tidak Informatif
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.06	0	22.06	Tidak Informatif

b. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	AIRPURA	49.16	34.78	83.94	Informatif
2	BATANG KAPAS	45.80	35.24	81.04	Informatif
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	39.46	32.30	71.76	Menuju Informatif
4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	36.93	33.87	70.80	Menuju Informatif
5	LENGAYANG	35.88	28.70	64.58	Cukup Informatif
6	KOTO XI TARUSAN	34.90	0	34.90	Kurang Informatif
7	IV JURAI	30.04	0	30.04	Kurang Informatif
8	RANAH PESISIR	29.94	0	29.94	Tidak Informatif
9	SILAUT	29.75	0	29.75	Tidak Informatif
10	LINGGO SARI BAGANTI	27.48	0	27.48	Tidak Informatif

11	SUTERA	27.11	0	27.11	Tidak Informatif
12	BAYANG UTARA	25.90	0	25.90	Tidak Informatif
13	PANCUNG SOAL	23.01	0	23.01	Tidak Informatif
14	LUNANG	20.27	0	20.27	Tidak Informatif
15	BAYANG	15.40	0	15.40	Tidak Informatif

c. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA NAGARI	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	BUNGA PASANG SALIDO	57.09	36.97	94.06	Informatif
2	KUBU TAPAN	53.55	36.43	89.98	Informatif
3	DURIAN SERIBU	51.20	34.90	86.10	Informatif
4	TARATAK SUNGAI LUNDANG	48.91	32.27	81.18	Informatif
5	KOTO RAWANG	42.30	33.37	75.67	Menuju Informatif
6	MUARA INDERAPURA	37.26	0	37.26	Kurang Informatif
7	PAINAN TIMUR	36.50	0	36.50	Kurang Informatif
8	BINJAI TAPAN	31.54	0	31.54	Kurang Informatif
9	PADANG XI PUNGGASAN	27.56	0	27.56	Tidak Informatif
10	TARATAK TANGAH LUMPO	27.27	0	27.27	Tidak Informatif
11	SAGO SALIDO	26.56	0	26.56	Tidak Informatif
12	PASAR BARU	26.20	0	26.20	Tidak Informatif
13	INDERAPURA UTARA	25.88	0	25.88	Tidak Informatif
14	PULAU KARAM AMPANG PULAI	25.86	0	25.86	Tidak Informatif
15	LIMAU PURUT TAPAN	25.80	0	25.80	Tidak Informatif
16	TALANG KOTO PULAI	25.72	0	25.72	Tidak Informatif
17	SIGUNTUR TUA	24.74	0	24.74	Tidak Informatif
18	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	24.42	0	24.42	Tidak Informatif
19	CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	23.87	0	23.87	Tidak Informatif
20	TALUAK	23.19	0	23.19	Tidak Informatif
21	INDERAPURA TIMUR	22.49	0	22.49	Tidak Informatif
22	PULAU RAJO INDERAPURA	22.72	0	22.72	Tidak Informatif
23	SUNGAI SARIAK LUMPO	22.39	0	22.39	Tidak Informatif
24	PALOKAN INDERAPURA	21.76	0	21.76	Tidak Informatif

25	LALANG PANJANG INDERPAURA	21.10	0	21.10	Tidak Informatif
26	TALUAK TIGO SAKATO	20.61	0	20.61	Tidak Informatif
27	SIGUNTUR	20.47	0	20.47	Tidak Informatif
28	BATANG BETUNG TAPAN	19.90	0	19.90	Tidak Informatif
29	LUBUK BETUNG INDERAPURA	19.21	0	19.21	Tidak Informatif
30	TLUK KUALO INDERAPURA	18.75	0	18.75	Tidak Informatif
31	LIMAU GADANG LUMPO	18.50	0	18.50	Tidak Informatif
32	IV KOTO HILIE	18.36	0	18.36	Tidak Informatif
33	KOTO NAN TIGO AMPEK KOTO HILIE	17.81	0	17.81	Tidak Informatif
34	JINANG KAMPUNG PANSUR	17.56	0	17.56	Tidak Informatif
35	AMPUAN LUMPO	16.96	0	16.96	Tidak Informatif
36	PASIR BINJAI SILAUT	16.70	0	16.70	Tidak Informatif
37	TANAH BAKALI INDERAPURA	16.51	0	16.51	Tidak Informatif
38	SURANTIH SUTERA	15.82	0	15.82	Tidak Informatif
39	DUKU	15.06	0	15.06	Tidak Informatif
40	TARATAK	13.06	0	13.06	Tidak Informatif



**Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi PPID Pembantu dan Nagari
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

4. Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Juni – November 2021)



Penilaian Tahap Visitasi Tingkat Provinsi Sumbar ke PPID Utama Pessel oleh Tim Komisi Informasi Provinsi (12 November 2021)

Visitasi ke Dinas Kominfo selaku PPID Utama sebagai Tahapan ke-3 oleh Tim Monev dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat



Presentasi 3 (tiga) besar Badan Publik sebagai Tahapan Akhir Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

5. Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2021, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :

- a. 705 permohonan informasi yang masuk melalui website PPID Utama terhadap informasi yang tersedia di website.
 - b. 15 permintaan informasi dari pemohon informasi melalui datang langsung/form permohonan informasi/email/pesan whatsapp terhadap informasi belum tersedia di website PPID Utama.
6. Capaian dari Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

- a. Juara 1 Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2021 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Predikat Informatif.



- b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Junaidi, S.Kom, M.E selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama penghargaan Achievement Motivation Person Award 2021 sebagai salah satu tokoh di Sumatera Barat yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam keterbukaan informasi publik.



- c. Untuk Kategori Pemerintahan Desa/Nagari se-Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengantarkan 2 (dua) Nagari sebagai peraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tk. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, adalah sebagai berikut :
1. Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai mendapatkan Terbaik 1 (satu) dengan predikat "Informatif"
 2. Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan mendapatkan Terbaik 1 (satu) dengan predikat "Informatif"



2.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan Pelatihan Operasional Pelayanan Informasi Publik ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 170.194.150,- (Seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100% dan anggaran terealisasi sebesar Rp.167,344,400,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 98,33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)		
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,600,000	6,600,000	100.00	100.00	-
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,000,000	7,910,650	98.88	100.00	89,350
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	1,250,000	1,250,000	100.00	100.00	-
4	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1,492,150	1,313,750	88.04	100.00	178,400
5	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	10,132,000	9,982,000	98.52	100.00	150,000
6	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	270,000	270,000	100.00	100.00	-
7	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	1,400,000	1,350,000	96.43	100.00	50,000
8	Belanja Makan dan Minum Rapat	16,605,000	16,598,000	99.96	100.00	7,000
9	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9,200,000	9,200,000	100.00	100.00	-
10	Honorarium Rohaniawan	1,200,000	500,000	41.67	100.00	700,000
11	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00	-
12	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10,100,000	10,100,000	100.00	100.00	-
13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	900,000	500,000	55.56	100.00	400,000
14	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,320,000	1,320,000	100.00	100.00	-

15	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,000,000	1,800,000	60.00	100.00	1,200,000
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,750,000	20,685,000	99.69	100.00	65,000
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,175,000	22,175,000	100.00	100.00	-
18	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	29,800,000	29,790,000	99.97	100.00	10,000
	J U M L A H	170,194,150	167,344,400	98.33	100.00	2,849,750

BAB IV

PENUTUP

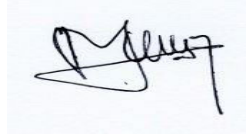
Laporan ini sebagai wujud pertanggungjawaban Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Penyediaan daftar informasi publik oleh masing-masing PPID Pembantu dan Nagari telah dilakukan melalui website masing-masing, tetapi masih ada beberapa PPID Pembantu dan Nagari yang tidak mencapai target publikasi dokumen informasi publik yang telah ditetapkan pada tahun 2021 ini. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan informasi.

Laporan ini juga untuk mengetahui dan mengukur realisasi fisik maupun keuangan dalam melaksanakan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan. Disamping itu laporan ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengukur ataupun menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Capaian dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memberikan penghargaan 4 (empat) kali berturut-turut kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Terbaik 1 (satu) dengan prediket “Informatif” Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Dan Nagari Bunga Pasang Salido dan Nagari Kubu Tapan sebagai Terbaik 1 dan 2 untuk kategori Pemerintah Desa/Nagari se-Sumatera Barat dengan predikat “Informatif”.

Demikian Laporan ini disusun sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik



MUSTIKAWATI. S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19721020 199701 2 001

Painan, 31 Desember 2021
Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)
Kasi Pelayanan e-Government



SILVIA PERMATA SARI. S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037